



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sukadana

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE 2025

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT BPR SUKADANA

www.bprasukadana.co.id



PT BPR SUKADANA salah satu Bank Perekonomian Rakyat di kota Solo yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK serta salah satu Bank Perekonomian Rakyat peserta penjaminan LPS.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR SUKADANA
TAHUN 2025**



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Sukadana

**JL. SLAMET RIYADI NO. 276 SURAKARTA
TELEPON: 0271 713949**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR SUKADANA
Alamat	Jl. Slamet Riyadi No. 276 Timuran Banjarsari Surakarta
Nomor Telepon	0271 713949

Penjelasan Umum:

GCG yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan nasabah, kepercayaan pemegang saham dan menumbuhkan integritas perusahaan. Praktik penerapan GCG di PT BPR SUKADANA yang baik bukan semata – mata memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun juga PT BPR SUKADANA berupaya selalu melakukan perbaikan – perbaikan dan melakukan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip – prinsip GCG. Hal ini ditempuh sebagai partisipasi PT BPR SUKADANA dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada Prinsip–Prinsip GCG. PT BPR SUKADANA menyadari bahwa, melalui penerapan GCG maka PT BPR SUKADANA akan tumbuh menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Untuk itu, PT BPR SUKADANA berkomitmen untuk senantiasa menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan dan mempertahankan eksistensi perusahaan di masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. Penerapan GCG pada PT BPR SUKADANA mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no 9 tahun 2024 Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS. Upaya penerapan GCG yang dilaksanakan PT BPR SUKADANA diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kegiatan dan tumbuh kembang PT BPR SUKADANA.

PT BPR SUKADANA senantiasa mendorong implementsi GCG di berbagai aspek perusahaan dengan cara melaksanakan self assessment penilaian GCG secara berkala untuk mendukung penerapan GCG yang semakin efektif. Pelaksanaan prinsip-prinsip (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha dan diharapkan PT BPR SUKADANA dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	WIRADI, SE
	Jabatan	Direktur Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
1. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur Utama. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja bawahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi operasional yang wajib tercatat di administrasi perusahaan. 3. Melakukan pembinaan nasabah secara khusus terhadap nasabah inti. 4. Melakukan pemantauan terhadap realisasi kinerja pegawai terhadap RBB.		

	5. Menjalin hubungan baik terhadap masyarakat dan instansi terkait dengan bank. 6. Menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Indonesia. 7. Membuat RBB. 8. Membuat laporan- laporan kegiatan operasional perusahaan yang wajib disampaikan kepada otoritas atau instansi terkait. 9. Membuat laporan perkembangan usaha secara berkala yang wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris/Pemegang Saham. 10. Membuat ketetapan batas memutus kredit untuk Manajer kredit guna memutus kredit untuk nasabah. 11. Membuat ketetapan batas wewenang memutus besar biaya penyelenggaraan operasional perusahaan. 12. Menetapkan peraturan pengelolaan keuangan. 13. Mengatur kegiatan pembukaan dan penutupan kas yang dilakukan bagian keuangan agar dapat dilaksanakan tepat waktu. 14. Membuat pertimbangan terhadap penilaian kinerja pegawai untuk kepentingan remunerasi pegawai. 15. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan. 16. Memberikan pelayanan secara baik dan wajar terhadap pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 17. Menjaga kerahasiaan bank yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku. 18. Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengetahui kerahasiaan dan bersifat merugikan bank. 19. Menyelenggarakan rapat-rapat yang bersifat wajib yang dibutuhkan oleh perseroan. 20. Bertanggung jawab selaku pejabat Direktur Utama PT BPR SUKADANA terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari.
--	--

2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Jabatan	Direktur YMF Kepatuhan
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur YMF Kepatuhan. - Melakukan kerjasama dengan Direktur Utama dalam rangka memenuhi RBB. - Melakukan kerja sama dengan Direktur Utama untuk melakukan efektivitas organisasi perusahaan dan efisiensi biaya perusahaan. - Menyusun sistem dan prosedur kerja GCG sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini. - Memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan, perjanjian, komitmen dengan OJK serta peraturan internal yang berlaku. - Membuat rekapitulasi penilaian kepatuhan bank secara berkala sebagai bahan evaluasi Direksi untuk perbaikan. - Melakukan pengawasan dan pamantauan terhadap kredit untuk tujuan mitigasi risiko kredit. - Melakukan penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan langkah upaya yang dilakukan. - Mengadakan pembinaan langsung kepada bawahan untuk peningkatan kinerja di bidangnya masing-masing. - Menyelenggarakan pembinaan langsung secara umum bersama Direktur Utama melalui rapat-rapat kerja. - Memonitor lingkungan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat. - Membuat penilaian terhadap kinerja Pegawai, untuk pertimbangan kenaikan gaji pegawai. - Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. - Memberikan pelayanan secara kooperatif terhadap pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. - Menjaga kerahasiaan bank yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia. - Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengetahui	

- kerahasiaan bank dan atau yang bersifat merugikan bank.
17. Bertanggungjawab selaku Direktur YMF Kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari.
18. Bersama sama dengan Direktur Utama melaksanakan Peraturan Peraturan yang dibuat oleh Otorisasi Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat dan melakukan perbaikan di dalam posisi yang cukup sehat.
3. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :
 - a. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan dan peraturan yang lain.
 - b. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
 - c. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR SUKADANA.
4. Monitor secara ketat atas debitur yang masih terdampak dampak COVID-19 dan macet sudah dilaksanakan.
5. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2025.
6. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing - masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advice kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temauan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya		
2.	Nama	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Jabatan	Komisaris
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advice kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temauan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya		

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
3. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu :
 - a. Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai.
 - b. Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.

- c. Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR SUKADANA.
- 4. Memonitor secara ketat debitur yang bermasalah agar Direksi dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- 5. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti paling lambat Desember 2025.
- 6. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah - langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- 7. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:
 PT BPR SUKADANA karena memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:
 Nihil. PT BPR SUKADANA karena memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	WIRADI, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,60
2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Drs. BAMBANG SAROSO, MSi
	Persentase Kepemilikan (%)	5,75
2.	Nama	M. DJAZULI, SE, MSi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,40

Anggota Direksi PT BPR SUKADANA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR		
1.	Nama	WIRADI, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	WIRADI, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si

Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	WIRADI, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Kedua Direksi PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Direksi, Hubungan dengan Anggota Dewan Komisaris, dan Hubungan dengan Pemegang Saham .

Anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain dan dengan Pemegang Saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	WIRADI, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	GUNTUR WICAKSONO, SM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR		
1.	Nama	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Kedua Direksi PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Direksi PT BPR SUKADANA, Hubungan dengan Anggota Dewan Komisaris, dan Hubungan dengan Pemegang Saham
Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain dan dengan Pemegang Saham

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp299.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp180.000.000
1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp48.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0
1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp54.900.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp39.200.000
1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp49.900.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp30.000.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Nihil

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	2,37 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,14 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,16 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,91 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,66 : 1

Nihil.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	06 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat dihadiri 2 orang Dewan Komisaris dengan agenda rapat : 1. Realisasi Rencana Bisnis 2. pengaruh Kebijakan KUR 3. Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis. 4. Evaluasi Realisis Rencana Bisnis 2024. 5. Perbaikan atas temuan otoritas. 6. Pembahasan kebijakan APU PPT		

	7. Evaluasi pengendalian Intern	
2.	Tanggal Rapat	02 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat dihadiri 2 orang Dewan Komisaris dengan agenda rapat : 1. Realisasi Rencana Bisnis 2. pengaruh Kebijakan KUR 3. Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis. 4. Evaluasi Realisis Rencana Bisnis 2025. 5. Perbaikan atas temuan otoritas. 6. Pembahasan kebijakan APU PPT 7. Evaluasi pengendalian Intern		
3.	Tanggal Rapat	04 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat dihadiri 2 orang Dewan Komisaris dengan agenda rapat : 1. Realisasi Rencana Bisnis 2. pengaruh Kebijakan KUR 3. Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis. 4. Evaluasi Realisis Rencana Bisnis 2025. 5. Perbaikan atas temuan otoritas. 6. Pembahasan kebijakan APU PPT 7. Evaluasi pengendalian Intern		
4.	Tanggal Rapat	03 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat dihadiri 2 orang Dewan Komisaris dengan agenda rapat : 1. Realisasi Rencana Bisnis 2. pengaruh Kebijakan KUR 3. Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis. 4. Evaluasi Realisis Rencana Bisnis 2025. 5. Perbaikan atas temuan otoritas. 6. Pembahasan kebijakan APU PPT 7. Evaluasi pengendalian Intern 8. Pembahasan terkait capaian RBB 2025 kaitannya dengan rencana RBB 2026		

Selama tahun 2025 terdapat 4 (empat) kali rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Drs BAMBANG SAROSO, M.Si
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	MUHAMMAD DJAZULI, SE, M.Si
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
--------------------------------------	--------------

Selama tahun 2025 terdapat 4 (empat) kali rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang dihadiri lengkap oleh semua Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam tahun 2025 tidak ada Penyimpangan Internal (fraud).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	5 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Selama tahun 2025 terdapat :
 5 (lima) permasalahan hukum perdata dalam proses penyelesaian, Eksekusi Hak Tanggungan.
 3 (tiga) permasalahan hukum perdata yang telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama kurun waktu 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	11 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Solo Berbagi
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Untuk kegiatan acara Solo berbagi rayakan lebaran.
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Al Ahad
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan zakat infaq untuk yayasan Al Ahad
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keamanan RW.03 Kelurahan Timuran
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan akomodasi ronda Idul Fitri Tanggal 29 Maret s/d 08 April 2025 RW.3 Kelurahan Timuran, Banjarsari.
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ofad Kota Surakarta
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Ofad Kota Surakarta.
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Krida Karya
	Penjelasan Kegiatan	Infraq untuk yayasan Krida Karya
	Jumlah (Rp)	Rp20.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Warga Timuran Banjarsari Solo
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi Bakti Sosial Lingkungan
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Kurban Masjid Mumin Priyobadan
	Penjelasan Kegiatan	Iuran dana kurban sapi di Masjid Mumin Priyobadan
	Jumlah (Rp)	Rp3.600.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	02 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panita Kurban Cepogo Boyolali
	Penjelasan Kegiatan	Iuran dana kurban sapi di Cepogo Boyolali
	Jumlah (Rp)	Rp2.700.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	14 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Krida Karya
	Penjelasan Kegiatan	Infraq untuk yayasan Krida Karya
	Jumlah (Rp)	Rp20.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Keluarga Ibu Siti Renohati
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kematian ibu Siti Renohati
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	04 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia HUT RI Desa Widororejo Makamhaji
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk acara HUT RI Desa Widororejo Makamhaji
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2025

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia HUT RI Desa Timuran Banjarsari
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk acara HUT RI Desa Timuran Banjarsari
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	11 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia HUT RI RW II Desa Timuran Banjarsari
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk acara HUT RI RW II Desa Timuran Banjarsari
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	03 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Pengajian Tohudan Karanganyar
	Penjelasan Kegiatan	Sumabgan untuk kegiatan Pengajian di Desa Tohudan Karanganyar
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	11 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Peringatan Maulid Nabi Priyobadan Timuran
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H Priyobadan, Timuran, Banjarsari.
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Krida Karya
	Penjelasan Kegiatan	Infraq untuk yayasan Krida Karya
	Jumlah (Rp)	Rp20.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	06 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia BIK Perbarindo PAC SOLO
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan penyelenggaraan BIK tahun 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.560.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	06 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Pemuda Pancasila Ranting Kismoyoso

	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan pengadaan ambulance emergency Pemuda Pancasila Ranting Kismoyoso
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia BIK Perbarindo PAC SOLO
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Cofee Break acara BIK 2025
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia BIK Perbarindo PAC SOLO
	Penjelasan Kegiatan	Akomodasi penyelenggaraan BIK 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	24 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al Wusto
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Beras sebanyak 35 Kg untuk masjid Al Wusto
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
22.	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo DPD Jawa Tengah
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan bencana Alam
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
23.	Tanggal Pelaksanaan	24 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Krida Karya
	Penjelasan Kegiatan	Infaq untuk yayasan Krida Karya
	Jumlah (Rp)	Rp20.000

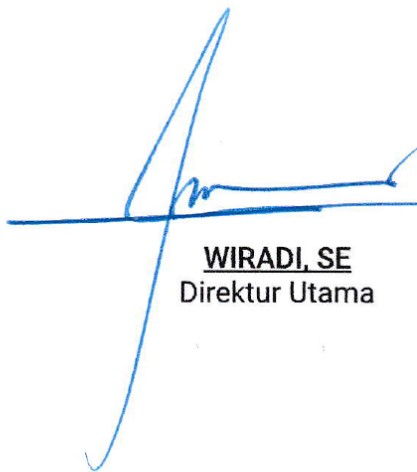
Total pemberian dana untuk kegiatan sosial PT BPR SUKADANA tahun 2025 sebesar Rp. 19.090.000,- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SUKADANA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 21 April 2026

PT BPR SUKADANA

Disetujui Oleh



WIRADI, SE
Direktur Utama



Drs. BAMBANG SAROSO, MSi
Komisaris Utama



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Gukadana